

Peran Manushya dalam Mendukung Demokrasi di Thailand

Nevy Rusmarina Dewi¹

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus – Indonesia

Abstract

Demonstrations in Thailand lasted for several months in 2020 initiated by the younger and educated generation who are pro-democracy. They made several demands, including the dismissal of Prime Minister Prayut, demanding changes to the constitution and demanding reform of the monarchy to reduce the power of King Maha Vajiralongkorn. The Manushya foundation (Manushya) is one of the driving organizations that inflames the spirit of democracy in Thai youth. The purpose of this study is to discuss the role played by Manushya in encouraging Thai youth to carry out pro-democracy demonstrations. This study uses a study library with qualitative methods. The results of the study show that the Manushya movement which prioritizes human rights in Thailand is one of the organizations that has succeeded in supporting the demonstration movement demanding democracy in Thailand in 2022. Several efforts have been made, among others, by reposting the momentum of democracy that occurred on the 14 October 1973 incident, published news pro-democracy support, reported on monks who carried out pro-democracy actions, criticized the limited freedom of information, and asked the government to pay attention to the human rights of the demonstrators.

Demonstrasi di Thailand berlangsung selama beberapa bulan pada tahun 2020 diprakarsai oleh generasi muda dan terpelajar yang pro-demokrasi. Mereka melakukan beberapa tuntutan, di antaranya pemecatan Perdana Menteri Prayut, menuntut perubahan konstitusi dan menuntut reformasi monarki untuk mengurangi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn. Manushya foundation (Manushya) menjadi salah satu organisasi penggerak yang mengobarkan semangat demokrasi pada pemuda Thailand. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas peran yang dilakukan oleh Manushya dalam mendorong pemuda Thailand untuk melakukan demonstrasi pro-demokrasi. Penelitian ini menggunakan study library dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan Manushya yang mengutamakan HAM di Thailand merupakan salah satu organisasi yang berhasil mendukung gerakan demonstrasi menuntut demokrasi di Thailand pada tahun 2022. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain, yaitu dengan memposting ulang momentum demokrasi yang pernah terjadi pada peristiwa 14 Oktober 1973, memuat berita dukungan pro-demokrasi, memberitakan para biksu yang melakukan aksi pro-demokrasi, melakukan kritik terhadap kebebasan informasi yang dibatasi, serta meminta pemerintah untuk memperhatikan HAM para demonstran.

Keywords: Thailand, Demonstrasi, Manushya, Pro-Demokrasi

¹ **Korespondensi:** Nevy Rusmarina Dewi (nevyrusmarina@iainkudus.ac.id), Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jl. Conge Ngembalrejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

Pendahuluan

Masyarakat sipil, demokrasi dan demokratisasi adalah konsep yang saling terkait. Civil society memberikan dampak positif bagi demokrasi dan demokratisasi, yaitu ketika civil society berperan dalam transisi atau perubahan politik dari otoritarianisme ke demokrasi. Jenis masyarakat madani yang dapat berkontribusi dalam demokratisasi adalah masyarakat madani yang dapat menjalankan perannya sebagai penyeimbang kekuasaan negara, menjembatani kepentingan masyarakat dan negara serta mampu mempengaruhi kebijakan negara yang berorientasi pada kepentingan umum. Sebaliknya, masyarakat sipil dapat berimplikasi negatif bagi demokrasi dan demokratisasi jika karakter dominannya adalah etnosentrisme, radikalisme, dan berorientasi pada kekuasaan. Peran aktif masyarakat sipil sangat dibutuhkan sebagai alternatif saluran partisipasi untuk menekan kepentingan masyarakat. Civil society sendiri dimaknai sebagai kumpulan lembaga atau organisasi di luar pemerintah dan swasta, atau sebagai ruang di mana kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak (Sumarto & Hetifah, 2004). Partisipasi aktif masyarakat sipil ini akan menentukan keberlangsungan suatu proses kebijakan, apakah nantinya kebijakan yang dibuat menjadi kebijakan yang

didedikasikan untuk kepentingan masyarakat atau sebaliknya.

Salah satu contoh peran masyarakat sipil dalam upaya demokrasi seperti yang terjadi pada demonstrasi di Thailand sepanjang tahun 2020 yang menuntut reformasi politik. Pemicunya adalah tindakan represif yang sering dilakukan rezim militer terhadap kelompok masyarakat kritis, sehingga menimbulkan tuntutan reformasi serta pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Demonstrasi ini dilakukan oleh ribuan pemuda Thailand yang dimotivasi oleh aktivitas masyarakat sipil yang menginginkan Thailand pro demokrasi. Demonstrasi berlangsung selama beberapa bulan dari Juli hingga November 2020. Sejak Raja Bhumibol Meninggalnya Adulyadej pada tahun 2016, gerakan reformasi monarki sudah mulai muncul di masyarakat, terutama dari kalangan muda, yang menyerukan pembatasan Raja Maha kekuatan Vajiralongkorn. Aktivis pro-demokrasi meminta monarki untuk beradaptasi dengan zaman modern dan menuntut penghapusan undang-undang pencemaran nama baik kerajaan, yang melindungi raja dari kritik, dan meminta raja untuk tidak terlibat dalam politik.

Militer di Thailand telah lama memosisikan diri sebagai satu-satunya pembela raja, sementara Raja Maha

Vajiralongkorn menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman, tetapi kekuasaannya membentang di setiap aspek masyarakat Thailand. Situasi ini tampaknya meresahkan sebagian masyarakat Thailand yang pro demokrasi, terutama kaum muda, karena dianggap tidak bijaksana dan tidak sejalan dengan tuntutan demokrasi yang ingin mereka kembangkan, sehingga memunculkan gerakan reformasi monarki yang sebelumnya tabu di Thailand. Demonstrasi seperti ini pernah terjadi di Thailand pada 14 Oktober 1973 untuk menggulingkan rezim militer yang berkuasa saat itu. Hasil dari gerakan demonstrasi tahun itu adalah kemenangan para pemuda pemrotes yang akhirnya menggulingkan rezim militer. Melihat kondisi politik di Thailand, saat ini demokrasi belum sesuai dengan harapan seluruh rakyat Thailand, terutama masih kuatnya pengaruh monarki dalam berbagai aspek kehidupan.

Banyak gerakan masyarakat sipil di Thailand yang mencoba melakukan berbagai tindakan untuk mendorong masyarakat dalam kondisi demokrasi. Yayasan Manushya sebagai salah satu masyarakat sipil di Thailand yang fokus pada gerakan hak asasi manusia. Yayasan ini baru berdiri tahun 2018 namun isu yang digulirkan cukup mengajak masyarakat Thailand untuk lebih peduli dengan isu pemberdayaan perempuan, kebebasan hak

asasi manusia, hak digital. Semangat untuk mensosialisasikan kebebasan hak, khususnya hak asasi manusia di Thailand, menjadi perhatian khusus bagi lembaga ini. Salah satu perannya sebagai masyarakat sipil adalah menjadi lembaga yang mendorong kebijakan yang lebih demokratis di Thailand. Melalui media yang dimiliki, Manushya banyak melakukan kegiatan sosialisasi tentang demokrasi. Selama demonstrasi yang berlangsung beberapa bulan di tahun 2020, Manushya memberikan dukungan pro-demokrasi melalui laporan berkala melalui media sosialnya. Manushya dan anggota masyarakat sipil lainnya juga mengambil sikap tegas untuk meminta pemerintah memperhatikan hak asasi manusia dari banyaknya demonstran.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan atau library research. Melalui metode ini, sumber data berasal dari buku, artikel jurnal, website, atau media informasi lainnya seperti koran online, Instagram. Prosedur penelitian data dalam metode penelitian ini adalah dengan membaca, mengkaji, menganalisis secara kualitatif semua sumber literatur yang berkaitan dengan peran Manushya dalam proses demokrasi di Thailand.

Konsep Dasar Teori

Arti Civil Society

Sebagaimana ditafsirkan oleh Alagappa bahwa masyarakat sipil (civil society) sebagai, pertama, sebuah wilayah di celah-celah negara, masyarakat politik, pasar, dan masyarakat luas untuk organisasi oleh kelompok non-negara, nonpasar yang mengambil tindakan kolektif dalam mengejar kepentingan publik; kedua, ruang yang berbeda untuk wacana dan konstruksi cita-cita normatif melalui interaksi di antara kelompok-kelompok non-negara berdasarkan ide dan argumen; ketiga, arena otonomi pemerintahan sendiri oleh aktor non-negara di bidang isu tertentu; dan, keempat, instrumen aksi kolektif untuk melindungi otonomi ranah publik non-negara, mempengaruhi tipe rezim, dan mempengaruhi politik dan kebijakan negara, masyarakat politik, dan pasar” (Alagappa, 2004).

John A. Hall dalam Gaffar memberikan pengertian masyarakat madani, yaitu pertama, masyarakat madani sebagai perkumpulan (Gaffar, 2006). Menurut Eisenstadt, masyarakat madani adalah masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam suatu negara yang mampu berinteraksi dengan negara secara mandiri. Masyarakat sebagai syarat adanya masyarakat madani meliputi komponen-komponen sebagai berikut: (1) otonomi; (2) akses publik terhadap lembaga

negara; (3) arena publik yang otonom; dan (4) arena publik terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Masih dari pengertian masyarakat sipil dari sisi asosiasi, Mouzelis mendefinisikan masyarakat sipil sebagai “semua kelompok dan institusi sosial yang dalam kondisi modernitas, terletak di antara kelompok kekerabatan primordial dan institusi di sisi lain” (Gaffar, 2006).

Kedua, masyarakat sipil dipandang sebagai ruang, di mana individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dalam semangat toleransi. Dalam ruang ini, publik dapat berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik di suatu negara. Larry Diamond menegaskan bahwa masyarakat sipil-wilayah kelompok perantara terorganisir yang sukarela, mandiri, independen dari negara dan keluarga, dan terikat oleh tatanan hukum atau seperangkat aturan bersama-dapat berkontribusi pada konsolidasi demokrasi dalam berbagai cara: dengan menstabilkan harapan dan tawar-menawar sosial, menghasilkan lingkungan normatif yang lebih sipil, membawa aktor lebih dekat ke proses politik, mengurangi beban pemerintahan, dan memeriksa potensi penyalahgunaan kekuasaan (Diamond, 1997). Habermas juga termasuk yang berpendapat bahwa masyarakat sipil adalah ruang publik. Jurgen Habermas, yang memperkenalkan pendekatan teori wacana, menyatakan bahwa masyarakat sipil adalah

ruang sosial di mana tindakan komunikatif mengambil bentuknya yang paling berbeda. Lebih lanjut, Habermas menyatakan “peran kunci dimainkan oleh asosiasi yang muncul secara relatif spontan dan bekerja dalam tatanan kelembagaan ruang publik.

Arti ketiga dari konsep masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki nilai keadaban (*civility*) yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbar. Christopher Bryant, yang membahas masyarakat di Skotlandia, setelah merujuk pada beberapa ahli, menyatakan bahwa masyarakat sipil mengacu pada masyarakat yang beradab atau terpoles yang berbeda dengan masyarakat yang aturan, barbar atau biadab (Gaffar, 2006). Klasifikasi makna konsep *civil society* juga disampaikan oleh Edward yang menekankan (Edward, 2004): 1) *Civil society as Associational Life* 2) *Civil society as the Good Society* 3) *Civil society as the Public Sphere* *Civil society* sebagai kehidupan sosial disampaikan oleh beberapa Pakar antara lain Alexis de Tocqueville dan John Keane. Sementara itu, John Keane mendefinisikan masyarakat sipil sebagai organisasi non-pemerintah yang dilindungi oleh hukum, mengatur dirinya sendiri dan membangun hubungan dengan negara (Edward, 2004). *Civil society* sebagai masyarakat yang baik dapat diartikan bahwa terwujudnya nilai-nilai dan norma-norma yang baik bagi perilaku

lembaga masyarakat itu sendiri maupun lembaga pemerintah. Robert Putnam memaknai konsep masyarakat sipil sebagai nilai dan norma. Putnam memberikan pemahaman bahwa kehidupan sosial menjamin seperangkat nilai dan norma tertentu dan kemudian ada hubungan antara norma dan tujuan masyarakat sipil (Edward, 2004).

Hubungan Masyarakat Sipil dengan Demokrasi dan Demokratisasi

Demokrasi dan masyarakat sipil memiliki hubungan yang sangat erat dan saling terkait. Pertama, masyarakat sipil merupakan prasyarat bagi demokrasi. *Civil society* sangat dibutuhkan di negara-negara yang sedang mengalami masa transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi. Walzer (1997) dalam Beitzinger - Lee (2010:10) berpendapat bahwa “hanya negara demokratis yang dapat menciptakan masyarakat sipil yang demokratis; hanya masyarakat sipil yang demokratis yang dapat mempertahankan negara demokratis”. Masyarakat sipil yang dimaksud tentu saja bebas dari pengaruh rezim serta mampu memperjuangkan kepentingan publik.

Civil society sebagai prasyarat atau prakondisi demokrasi disampaikan oleh Robert Dahl (1989) dalam Gaffar yang mengemukakan indikator demokrasi empiris, yaitu adanya hak dan kebebasan

dalam membentuk dan bergabung dalam perkumpulan otonom (Gaffar, 2006). Pernyataan Robert Dahl diperkuat dengan hasil penelitian Tocqueville tentang demokrasi di Amerika. Menurut Tocqueville, demokrasi di Amerika dapat berkembang dengan baik karena adanya asosiasi-asosiasi yang hidup secara otonom, terlepas dari pengaruh dan intervensi negara. Kelompok asosiasi seperti kelompok Gereja, LSM berkontribusi pada demokrasi liberal di Amerika. Perkumpulan yang dapat memberikan pengaruh positif bagi demokrasi adalah perkumpulan yang mampu membela kepentingan bersama, menyeimbangkan kekuatan negara dan pasar serta mampu menjembatani masyarakat dan negara. Kedua, masyarakat sipil dapat membangun demokrasi.

Peran Masyarakat Sipil dalam Proses Demokrasi

Menurut Juan Linz dan A. Stepan, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam tahap demokratisasi, tahap liberalisasi dengan berperan dalam proses konstruksi hak-hak individu dan perluasan ruang gerak masyarakat (Linz & Stephen, 1996). Kemudian pada tahap transisi berperan dalam memprovokasi kejatuhan rezim otoriter melalui protes, demonstrasi dan aksi jalanan lainnya. Sedangkan pada tahap konsolidasi, dianggap berperan

dalam upaya membentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel kepada rakyat. Dalam kaitannya dengan demokratisasi atau menuju konsolidasi demokrasi, masyarakat sipil juga memainkan perannya seperti yang terjadi di Korea Selatan. Sunhyuk Kim dalam Alagappa menjelaskan bahwa gerakan masyarakat sipil di Korea Selatan berkoordinasi dengan partai politik yang membantu proses demokratisasi dan mengarah pada demokrasi yang terkonsolidasi (Alagappa, 2004). Pengalaman di Eropa Timur dan Rusia dapat menjadi contoh efektivitas masyarakat sipil sebagai basis demokratisasi dan konsolidasi demokrasi. Sementara untuk kelompok masyarakat sipil Kiri Baru seperti Jurgen Habermas, masyarakat sipil yang mampu berdampak pada demokratisasi adalah lembaga masyarakat sipil yang harus bertindak melindungi perkembangan otonomi opini publik di ruang publik dari segala bentuk intimidasi oleh birokrasi negara, sistem kekuasaan ekonomi dan kekuatan pasar (Baker, 2002).

Diamond melakukan penelitian tentang proses konsolidasi demokrasi di negara-negara Amerika Latin. Dalam penelitiannya, Diamond tidak membangun langkah-langkah demokrasi, tetapi menekankan pada satu dimensi penting dalam demokrasi, yaitu adanya kompetisi

yang bermakna, partisipasi politik yang tinggi, dan kebebasan sipil dan politik yang dijamin oleh supremasi hukum. Lebih lanjut, Diamond dalam penelitiannya berfokus pada politik, faktor budaya dan masyarakat sipil, serta melihat faktor ekonomi negara dalam mendukung upaya konsolidasi demokrasi (Diamond, 1997). Almond menekankan bahwa budaya politik sangat sentral dalam upaya konsolidasi demokrasi, karena demokrasi membutuhkan “seperangkat” nilai-nilai politik, orientasi warganya, moderasi, toleransi, sopan santun, kemandirian, pengetahuan dan partisipasi (Vanhanen, 2003). Perlu dicatat bahwa masyarakat sipil yang dapat membangun demokrasi memiliki prasyarat tertentu untuk membangun demokrasi, seperti argumen Croissant, Lauth, dan Merkel dalam Beitinger-Lee, yaitu bahwa masyarakat sipil harus mampu menjadi (Beitinger-Lee, 2010): (1) Fungsi Protektif (2) Fungsi Mediatif (3) Fungsi Sosialisasi (4) Fungsi Integratif (5) Fungsi Komunikatif.

Hasil Penelitian

Gerakan Pro-Demokrasi melalui Demonstrasi

Demonstrasi menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand telah berlangsung sejak Juli 2020. Pemicunya adalah tindakan represif yang sering dilakukan rezim militer terhadap kelompok masyarakat kritis, yang berujung pada

tuntutan reformasi monarki juga sebagai pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Para pengunjuk rasa juga berpendapat bahwa Prayut merekayasa pemilihan tahun lalu untuk mempertahankan kekuasaan yang dia rebut dalam kudeta 2014. Demonstrasi secara luas bertujuan untuk mengakhiri kekuasaan pemerintah dan membatasi kekuasaan raja. Gerakan pro-demokrasi yang diprakarsai pemuda ini juga ingin mengakhiri satu dekade kekerasan antara pendukung rezim militer (dipimpin oleh Prayuth Chan-o-cha) dan penentangannya (republika.co.id, 2020). Demonstrasi besar-besaran terjadi di Thailand mulai 13 Oktober 2020 yang digaungkan oleh ribuan anak muda. Mereka berunjuk rasa menyuarakan Gerakan Pro-Demokrasi yang menghasilkan beberapa tuntutan, antara lain: menuntut amandemen konstitusi, meminta PM Prayut Chanocha mundur untuk segera mengadakan pemilihan baru, serta menyerukan reformasi monarki (bbc.com, 2020).

Seperti diketahui, militer di Thailand telah lama memosisikan diri sebagai satu-satunya pembela raja, sedangkan Raja Maha Vajiralongkorn menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman, tetapi kekuatannya sangat besar dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Thailand.

Kondisi ini dinilai sebagian masyarakat Thailand yang pro demokrasi, terutama kaum muda, karena dianggap kurang bijak dan tidak sejalan dengan tuntutan demokrasi yang ingin mereka kembangkan. Akhirnya, kondisi ini memunculkan gerakan reformasi monarki yang sebelumnya tabu. Kekuasaan raja di Thailand memang cukup besar jika didasarkan pada *lese - majeste hukum*, yang melarang penghinaan terhadap monarki, menjadikannya salah satu hukum paling ketat di dunia. Mereka yang dinyatakan bersalah melanggar peraturan ini akan menghadapi hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan ketentuan hukum digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk menekan kebebasan berekspresi. Sejak Raja Bhumibol Meninggalnya Adulyadej pada tahun 2016, gerakan reformasi monarki sudah mulai muncul di masyarakat, terutama dari kalangan muda, yang menyerukan pembatasan Raja Maha kekuatan Vajiralongkorn. Aktivis pro-demokrasi meminta monarki untuk beradaptasi dengan zaman modern dan menuntut penghapusan undang-undang pencemaran nama baik kerajaan, yang melindungi raja dari kritik, dan meminta raja untuk tidak terlibat dalam politik. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh ribuan anak muda mengakibatkan pemerintah mengeluarkan SK darurat yang melarang demonstrasi mereka karena dapat

mengancam kerajaan (Yayasan Manushya, 2020). Demokrasi berlangsung sehari-hari, bahkan pemerintah akhirnya mengeluarkan dekrit yang melarang segala bentuk kegiatan kumpul-kumpul. Pemerintah Thailand terus berupaya menekan eskalasi demonstrasi dengan berbagai upaya. Salah satunya dengan membatasi aktivitas jurnalistik di tanah air.

Manushya sebagai Civil Society di Thailand

Yayasan Manushya didirikan di Thailand pada tahun 2017 oleh Emilie Palamy Pradikit. Dalam bahasa Sansekerta, Manushya berarti 'Manusia', sebagai organisasi nirlaba yang dipimpin oleh perempuan & inovatif yang mempromosikan pemberdayaan masyarakat untuk memajukan hak asasi manusia masyarakat yang terpinggirkan dan memperjuangkan keadilan sosial. Manushya memiliki Visi: percaya pada 'kekuatan positif manusia yang tidak terbatas' dalam membangun bersama masyarakat yang inklusif, adil, setara dan damai di Asia, di mana setiap orang menikmati hak asasi manusia, tanpa meninggalkan siapa pun. Misinya adalah untuk menghubungkan dan memberdayakan komunitas lokal di seluruh Asia untuk menjadi pusat keputusan dan kebijakan yang memengaruhi mereka. Masyarakat menjadi Agen Perubahan yang

memperjuangkan hak-hak mereka dan memberikan solusi bagi peningkatan kehidupan dan penghidupan mereka.

Peran dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Thailand

Manushya yayasan, berkolaborasi dan bekerja sama untuk memajukan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Mereka menyadari pentingnya pekerjaan konstruktif mereka untuk memastikan perubahan positif terbesar bagi masyarakat Thailand. Namun, meskipun mereka bekerja sama dengan semua mitra yang bersedia untuk memajukan hak asasi manusia, Yayasan Manushya adalah organisasi hak asasi manusia yang sepenuhnya independen. Tujuan utama mereka untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan lebih adil didasarkan semata-mata pada kebutuhan masyarakat, dengan satu-satunya tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh perilaku bisnis atau pemerintah. Pendekatan mereka adalah melalui pemberdayaan komunitas yang tidak terlihat dan terpinggirkan, berbagi pengetahuan dengan mereka sehingga mereka dapat menegaskan hak-hak mereka, memfasilitasi keterlibatan mereka yang berarti dalam proses sehingga mereka dapat menjadi 'agen perubahan'

yang memberikan solusi untuk meningkatkan mata pencaharian mereka.

Manushya juga bekerja sama dengan Departemen Kehakiman untuk Perlindungan Hak dan Kebebasan di Thailand yang merupakan elemen penting untuk mencapai hal ini. Bagi Manushya, kolaborasi dan kritik adalah mitra yang tidak terpisahkan, dan meskipun kami antusias bekerja sama, kami melakukannya dengan kekuatan pendorong pemberdayaan masyarakat pada intinya. Artinya, ketika kita bekerja dengan orang lain, hubungan kerja harus didasarkan pada saling menghormati satu sama lain, idealnya dipertahankan dengan mengadopsi pendekatan bottom-up daripada top-down. Motivasi dan prinsip utama adalah kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Jadi sementara kami percaya nilai hubungan yang kuat dengan mereka yang berkuasa tidak dapat disangkal merupakan alat penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia, kami tidak akan mengembangkan dan memelihara hubungan seperti itu berdasarkan apa pun selain mencapai tujuan komunitas yang kami layani, dan kami akan tidak dan tidak akan. tidak akan pernah menghindari dari suara yang kuat dan kritis dari orang-orang yang bekerja dengan kita jika perlu untuk memajukan kebutuhan masyarakat. Independensi kami sangat penting bagi kami

dan itulah yang memungkinkan kami untuk secara efektif mengatasi pelanggaran hak dan ketidaksetaraan di Thailand (Manushya foundation.org, 2020).

Dukungan Manushya dalam Demokrasi di Thailand

- a. Posting flashback demokrasi pada momentum demonstrasi 14 Oktober 1973

14 oktober 1973 menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Thailand modern. Pada tahun 1973 pemerintah militer thanom menghadapi beberapa skandal termasuk korupsi dan dikritik karena kurangnya transparansi. Ketika diperintahkan untuk membubarkan kekerasan pecah. Demonstrasi saat itu menewaskan 77 orang dan melukai 857 orang. Pemerintah mengeluarkan tank, helikopter dan senjata militer untuk mendukung polisi dalam mengantisipasi gelombang demonstrasi. Kritik tersebut menghasilkan demonstrasi pro-demokrasi dan sentimen anti-pemerintah. Kemenangan besar bagi rakyat, protes mengakibatkan berakhirnya rezim kediktatoran militer Thanom Kittikachorn (Yayasan Manushya). Pentingnya acara ini semakin diperkuat dengan keberhasilan para pemimpin mahasiswa dalam menyatukan seluruh

negeri untuk tujuan bersama. Manushya membela pengunjuk rasa mahasiswa Thailand, kami menyerukan kepada pemerintah Thailand dan monarki untuk berhenti mengulangi pelanggaran di masa lalu.

- b. Memuat berita dukungan pro-demokrasi

Kampanye isu demokrasi dan hak asasi manusia oleh pemerintah daerah cenderung melanggar hak asasi manusia untuk menegaskan otoritas mereka dan memperkuat kontrol mereka. mengendalikan arus informasi dan menindas kebebasan berekspresi dan kebebasan pers dengan latar belakang ruang sipil yang menyusut. penangkapan, penahanan, penuntutan, atau penganiayaan terhadap lawan politik, jurnalis, aktivis, dan lainnya karena diduga menyebarkan berita bohong. pemolisian siber yang agresif dan peningkatan pengawasan online ([instagram.com/manushyafoundation/](https://www.instagram.com/manushyafoundation/), 2020). Manushya menyiarkan berita langsung selama demonstrasi pro-demokrasi selama beberapa bulan, melalui saluran media sosialnya. Emile menjelaskan tiga tuntutan para pengunjuk rasa hari ini: revisi konstitusi untuk memastikan demokrasi sejati di Thailand dengan konstitusi yang ditulis oleh rakyat dan untuk rakyat. Reformasi monarki untuk

mengekang kekuasaan keluarga kerajaan dan pembentukan negara untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat dengan memulihkan demokrasi sejati. Pengunduran diri perdana menteri Prayout dan pemerintahannya.

Lebih lanjut Emile mengklarifikasi bahwa anak muda turun ke jalan bukan karena ada seseorang atau semacam kekuatan di belakang mereka tetapi hanya karena mereka tidak tahan dengan ketidaksetaraan, ketidakadilan yang terjadi di negara ini. mereka menginginkan kesetaraan, keadilan dan hak asasi manusia untuk semua. mereka ingin memutuskan masa depan mereka sendiri di bawah demokrasi yang sesungguhnya. Manushya berdiri dalam solidaritas dengan pemuda Thailand dan rakyat Thailand dalam perjuangan untuk demokrasi sejati, kesetaraan, keadilan di Thailand. Kami meminta pemerintah Thailand untuk mendengarkan suara rakyat dan benar-benar melayani rakyatnya sebagaimana mestinya (manushyafoundation.org).

c. Mengkhotbahkan para biksu pro-demokrasi

Biksu bergabung dengan mahasiswa dalam protes pro-demokrasi! Baca terus untuk melihat apa tuntutan mereka dan risiko yang

mereka hadapi dalam memprotes monarki Sangha dan untuk demokrasi sejati di Thailand. “Kami tidak seharusnya memberikan wawancara atau berbicara tentang politik, tetapi kami ingin mereka [para pengunjuk rasa] berhasil. Demokrasi adalah hal yang baik. 8 November, di mana ia bergabung dengan pemuda dan mahasiswa dalam perjuangan mereka untuk kebebasan dan demokrasi, bahkan meskipun biksu tidak seharusnya terlibat dalam politik dan tidak dapat memilih.

Yayasan Manushya menyerukan kepada pemerintah untuk berhenti melecehkan pengunjuk rasa damai yang hanya menginginkan demokrasi sejati dengan sistem peradilan yang adil dan menghormati kebebasan. Kami berdiri dalam solidaritas dengan semua biksu yang menemukan keberanian untuk melawan hierarki mereka dan mengambil risiko untuk berbicara menentang sistem yang rusak. Mereka memiliki hak asasi yang sama dengan orang lain untuk melawan kediktatoran dan menuntut reformasi kritis (manushyafoundation.org).

Meskipun biksu tidak seharusnya terlibat dalam politik dan tidak memiliki hak untuk memilih, mereka semakin berpartisipasi dalam protes

untuk memperjuangkan kebebasan, keadilan dan demokrasi. Berikut adalah tuntutan para biksu: pertama, mereka menginginkan doktrin atau dharma Buddhis, berfungsi sebagai sistem demokrasi, di mana suara mereka dapat dihitung dan mereka menginginkan demokrasi daripada monarki. Kedua, mereka menginginkan keadilan yang adil, di komunitas biksu atau komunitas lain mereka ingin pemerintah berhenti melecehkan pengunjuk rasa secara damai. Ketiga, mereka ingin mengakhiri sistem biksu Buddha di mana tokoh senior memprioritaskan uang dan menjadi haus kekuasaan. Keempat, mereka dilarang terlibat dalam politik, tetapi mereka ingin dapat berbicara dan menyuarakan pendapat mereka. Kelima, mereka menginginkan kebebasan untuk menentukan hidup dan masa depan mereka sendiri. Keenam, mereka tidak ingin patriark tertinggi dari posisi teratas dalam sangha ditunjuk oleh monarki.

d. Mengkritik kebebasan informasi yang dibatasi

Juru bicara kementerian digital pemerintah Thailand Puchapong Nodthaisong mengatakan bahwa regulator penyiaran dan kementerian digital Thailand akan menyelidiki dan

mengambil tindakan terhadap konten media yang dianggap memprovokasi publik. Bahkan Kementerian Digital mengatakan telah meminta perintah pengadilan untuk menghapus konten dari empat media dan halaman protes, di antara lebih dari 300.000 konten yang dikatakan melanggar hukum Thailand. Pemerintah memerintahkan larangan berita dan informasi online yang dapat mempengaruhi keamanan nasional Kamis lalu karena juga melarang pertemuan politik lebih dari lima orang dalam menghadapi tantangan yang meningkat. Protes telah terjadi setiap hari sejak itu, yang terakhir menarik puluhan ribu orang di Bangkok dan di seluruh negeri. Polisi memasang angka 20.000 pengunjuk rasa di ibu kota (pikiranrakyat.com, 2020). Mengikuti keputusan Prayut Otoritas Chanocha untuk menyelidiki dan kemungkinan menutup beberapa outlet berita Thailand, termasuk Standard, Reporter, Prachathai, dan Voice TV, dewan redaksi Thai Enquirer menyampaikan sikap resmi mereka sebagai berikut: "Jurnalisme bukanlah kejahatan, penyensoran bukanlah pilihan" (kompas.com, 2020). Yayasan Manushya, sebuah kelompok independen yang mengkampanyekan kebebasan online,

menyebut langkah itu sebagai upaya untuk membungkam media. Menurut direktur Manushya Emilie Palamy Pradikit larangan konten berita dihapus karena larangan unjuk rasa tidak berhasil, pemerintah yang didukung militer berharap dapat menciptakan ketakutan untuk mengatakan yang sebenarnya (Republika.com, 2020).

- e. Minta pemerintah memperhatikan HAM para demonstran

Yayasan Manushya bersama beberapa kelompok masyarakat sipil lainnya yang prihatin dengan kondisi ribuan demonstran di Thailand, bersama-sama menyerukan kepada pemerintah untuk tidak mengabaikan keselamatan para demonstran dan memperhatikan hak asasi manusia. Berikut beberapa pernyataan masyarakat sipil yang secara bersama-sama memberikan pernyataan.

Tabel: daftar civil society pro-demokrasi (manushyafoundation.org)

Article 19	Human Rights Watch
Asian Network for Free Elections	Amnesty International
Civil Rights Defenders	CIVICUS
Fortify Rights	FIDH

ASEAN Parliamentary for Human Rights	International Commission of Jurists
Manushya	Asia Democracy Network
Asian Forum	

Berikut ini adalah pernyataan bersama tentang protes pro-demokrasi pada 17 dan 25 November 2020 bahwa semua organisasi yang menandatangani petisi ini mengutuk penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan oleh polisi Thailand terhadap pengunjuk rasa damai yang berbaris ke parlemen nasional di Bangkok pada 17 November 2020. Kami khawatir pihak berwenang dapat mengambil tindakan serupa ketika dihadang oleh pengunjuk rasa yang menyatakan akan berbaris ke kantor pusat Bank Umum Siam pada 25 November 2020 (manushyafoundation.org). Mereka meminta pemerintah Thailand untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak para demonstran untuk melakukan protes damai, sejalan dengan kewajiban internasional Thailand di bawah ICCPR dan hukum kebiasaan internasional. Secara khusus, Thailand harus:

1. Izinkan pawai Gerakan Rakyat diadakan pada tanggal 25 November dan izinkan pengunjuk rasa non-kekerasan, termasuk

mereka yang masih anak-anak, untuk melakukan demonstrasi damai di depan kantor pusat Bank Umum Siam.

2. Melindungi hak-hak para pengunjung rasa, termasuk mereka yang masih anak-anak, sesuai dengan Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia No. 37 tentang Hak Berkumpul dengan Damai. dan berusaha untuk “mengidentifikasi dan mengisolasi setiap individu yang melakukan kekerasan secara terpisah dari majelis utama.”

3. Memfasilitasi pelaksanaan hak untuk berkumpul secara damai dan menahan diri dari membubarkan majelis dengan menggunakan senjata, termasuk senjata yang tidak terlalu mematikan, terhadap pengunjung rasa sesuai dengan Prinsip-Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Panduan lain tentang senjata yang tidak terlalu mematikan.

4. Melindungi para pengunjung rasa, termasuk mereka yang masih anak-anak, dari kekerasan dan campur tangan aktor non-anggota Parlemen ASEAN untuk Negara Hak Asasi Manusia, sekaligus melindungi hak-hak kontra-demonstran.

5. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hak yang terkait dengan tindakan keras pemerintah terhadap gerakan protes dan

untuk memastikan bahwa mereka yang haknya telah dilanggar menikmati hak atas pemulihan yang efektif, sebagaimana dijamin dalam pasal 2(3) ICCPR.

Diskusi

Menurut Juan Linz dan A. Stepan, masyarakat sipil memiliki peran penting dalam tahap demokratisasi, tahap liberalisasi dengan berperan dalam proses konstruksi hak-hak individu dan perluasan ruang gerak masyarakat. Kemudian pada tahap transisi berperan dalam memprovokasi kejatuhan rezim otoriter melalui protes, demonstrasi dan aksi jalanan lainnya. Sedangkan pada tahap konsolidasi, dianggap berperan dalam upaya membentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel kepada rakyat.

Civil Society di berbagai negara memiliki peran sentral dalam mendorong demokratisasi di suatu negara. Banyak yang berpendapat bahwa masyarakat sipil memiliki peran utama dalam transisi menuju demokrasi. Pada tahap liberalisasi dianggap berperan dalam melakukan konstruksi hak individu dan perluasan gerakan individu di ruang publik, kemudian pada tahap transisi banyak yang menganggap provokasi yang mengakibatkan tumbangnyanya suatu rezim melalui protes terhadap pemerintah atau demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahap konsolidasi mereka

dianggap telah mendorong terbentuknya pemerintahan yang baik dan transparan serta menjamin terselenggaranya demokrasi di tanah air. Demikian pula yang terjadi di Thailand, masyarakat sipil, yaitu Yayasan Manushya, turut mendorong pemenuhan hak asasi individu dan memberikan dukungan bagi demokrasi.

Civil society sangat penting bagi suatu Negara sebagai prasyarat demokrasi, serta membangun demokrasi (Asrida et al., 2021). Peran Manushya sebagai salah satu civil society menjadi penting karena sebagai prasyarat demokrasi memiliki tugas untuk memperjuangkan kepentingan umum yang bebas dari rezim manapun karena bertujuan untuk mendorong bergulirnya demokrasi.

Manushya telah memenuhi dua peran, yaitu tahapan liberalisasi dan transisi. Pada tahap liberalisasi, Manushya banyak melakukan edukasi dan aksi untuk pengakuan HAM bagi masyarakat Thailand. Meski baru berdiri pada 2018, yayasan ini memiliki gerakan masif untuk penegakan HAM. Melalui platform di website dan media sosial seperti di Instagram. Manushya secara rutin dalam unggahan Instagramnya yang isinya mengedukasi publik tentang isu-isu yang sedang dan sedang berlangsung terkait kebebasan berekspresi, kebebasan hak asasi manusia, dan pemberdayaan manusia. Melalui unggahan tersebut, diharapkan

dapat mengubah masyarakat Thailand, khususnya generasi muda, agar lebih peduli dengan isu-isu terkini di Thailand yang masih belum mendapatkan perhatian pemerintah, terutama yang mendorong demokrasi di Thailand.

Pada tahap Transisi, menurut J. Linz dan A. Stepan, masyarakat sipil memprovokasi jatuhnya rezim otoriter, hal ini dilakukan oleh Manushya dengan memberikan dukungan terhadap demonstrasi pro-demokrasi di Thailand. Selama demonstrasi yang berlangsung berbulan-bulan, Manushya aktif mendukung melalui media sosial yang isinya mendukung kegiatan demonstrasi agar terjadi perubahan sendi-sendi kehidupan politik di Thailand. Bahkan, bersama beberapa masyarakat sipil lainnya, Manushya secara resmi memberikan pernyataan resmi, beberapa di antaranya adalah bahwa pemerintah harus memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menyuarakan hati nuraninya untuk Thailand yang lebih baik. Manuahya juga menyuarakan bahwa hak-hak para pengunjuk rasa dilindungi dan dilindungi karena beberapa dari mereka adalah anak-anak yang juga berpartisipasi dalam demonstrasi. Mereka juga meminta pemerintah untuk memfasilitasi demonstrasi damai oleh para demonstran dan polisi untuk tidak menggunakan kekerasan untuk membubarkan mereka.

Alagappa berpendapat bahwa masyarakat sipil adalah variabel kunci yang menjelaskan liberalisasi politik dan transisi menuju demokrasi dan pengembangan masyarakat sipil sebagai prasyarat untuk konsolidasi demokrasi. Dengan adanya masyarakat sipil, masyarakat Thailand tampaknya memiliki dukungan yang besar di belakang mereka. Masyarakat sipil melakukan program kampanye dan advokasi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membuka ruang politik dan memperluas jaringan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia sehingga mereka memiliki ruang untuk menentukan nasibnya sendiri dan menuntut hak atas keadilan, kebebasan dalam negara demokrasi menurut standar internasional. yang menghormati hak atas kebebasan. Mereka juga membuka dukungan terbuka untuk kebebasan digital di mana pemerintah berusaha menutup akses informasi bagi publik, terutama terkait pemberitaan terkait demonstrasi pro-demokrasi.

Penutup

Kondisi demokrasi di Thailand jauh dari sempurna, hal ini karena militer sangat dekat dengan pemerintah dan karena monarki sangat kuat dalam segala aspek kehidupan di Thailand. Kondisi ini membuat generasi muda berusaha keluar

dari zona kurang demokratis melalui demonstrasi yang terjadi selama beberapa bulan sepanjang tahun 2020. Tuntutan generasi muda adalah reformasi politik terkait kekuasaan monarki dan menuntut agar Perdana Menteri Prayuth yang sedang menjabat dapat mundur karena kekuasaannya dianggap tidak demokratis. Demonstrasi generasi muda mendapat dukungan penuh dari banyak pihak, terutama masyarakat sipil. Masyarakat sipil memainkan peran utama dalam mendukung kampanye pro-demokrasi yang diiklankan di Thailand. Salah satunya adalah Yayasan Manushya sebagai masyarakat sipil yang fokus pada pemenuhan hak asasi manusia di Thailand. Melalui unggahan di web dan media sosial, Manushya mencoba menjembatani kebutuhan demokrasi di Thailand melalui konten, kampanye, dan pendidikan baik hak asasi manusia maupun kebebasan individu di Thailand.

DAFTAR PUSTAKA

- Alagappa, M. (2004). *Masyarakat Sipil Dan Perubahan Politik di Asia: Memperluas dan Mengontrak Ruang Demokrasi*. Stanford University Press.
- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nahkoda Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2).
- Baker, G. (2002). *Masyarakat Sipil dan Suara Alternatif Teori Demokrasi. Amerika Serikat dan Kanada*. Routledge.
- bbc.com. (2020, October 15). *Protes Thailand: Bagaimana Gerakan Pro-demokrasi Mendapatkan Momentum*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-54542252>.
- Beitinger-Lee, V. (2010). *(Un) Civil society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena*. Routledge.
- Diamond, L. (1997). *Consolidating the Third Wave Democracies: Regional Challenges*. The Johns Hopkins University Press.
- Edward, M. (2004). *Masyarakat sipil*. Odyssey Press Inc.
- Gaffar, A. (2006). *Transisi Politik Indonesia Menuju Demokrasi*. Perpustakaan Siswa.
- instagram.com/manushyafoundation/. (2020). *Manushya Foundation*. <https://www.instagram.com/Manushyafoundation/>.
- kompas.com. (2020, October 19). *Aksi Masih Terjadi, Pemerintah Thailand Akan Selidiki Media*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/19/165100765/Aksi-Masih-Terus-Terjadi-Governmental-Thailand-Will-Investigation-Media?Page=all>.
- Linz, Juan. J., & Stephen, A. (1996). *Masalah Transisi dan Konsolidasi Demokrat: Eropa Selatan, Amerika Selatan, dan Eropa Pasca-Komunis*. The Johns Hopkins University Press.
- manushyafoundation.org. (n.d.). *Bangkitnya Biksu Pro-Demokrasi: Bergabung dengan Perjuangan untuk Kebebasan dan Keadilan di Thailand*. <https://www.manushyafoundation.org/post/the-rise-of-pro-democracy-monks-joining-the-fight-for-freedom-and-justice-in-thailand>.
- pikiranrakyat.com. (2020, October 20). *pikiranrakyat.com*.
- republika.co.id. (2020, October 15). *Inilah Alasan Warga Thailand Menggelar Demonstrasi Selama Berbulan-bulan*. <https://republika.co.id/berita/Qi8mcn459/Ini-Sebabwarga-Thailand-Demoberbulanbulan>.
- Republika.com. (2020, October 19). *Selidiki Empat Media, Otoritas Thailand Terima Kecaman*. *Republika.Com*.
- Sumarto, & Hetifah, S. (2004). *Inovasi, Partisipasi, dan Tata Kelola yang Baik: 20 Inisiatif Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Vanhanen, T. (2003). *Democratization: A Comparative Analysis of 170 Countries*. Routledge.